

BAB II

KONVENSI KERANGKA KERJA PBB

TENTANG PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim sudah berjalan selama ratusan tahun, tidak dapat dihindari, dan terakhir ini berlangsung makin cepat. Yang terpenting dalam kehidupan sekarang dan masa depan adalah bagaimana manusia penghuni bumi bersungguh-sungguh mengupayakan pengurangan emisi untuk sumber atau menambah gas rumah kaca. Pemanasan global bukanlah hal yang buruk. Tanpa adanya pemanasan global, rata-rata suhu permukaan bumi hanyalah -18 Derajat Celcius saja. Suhu rata-rata tersebut terlalu rendah bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pemanasan global suhu rata-rata bumi naik menjadi 15 Derajat Celcius. Karena itu pemanasan global adalah baik untuk manusia. Tetapi segala sesuatu yang berlebihan adalah buruk.

Pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan, dibelahan dunia yang lain terjadi hujan yang sangat deras, sedangkan dibelahan dunia lain, terjadi kekeringan yang tak dapat dihindari. Banyaknya gejala alam seperti munculnya banyak penyakit, banjir yang datang tiba-tiba, tanah longsor, badai, angin rebut dan sebagainya. Gejala-gejala alam tersebut telah menjadi perhatian banyak pihak terutama bagi negara-negara yang terancam keutuhan wilayahnya karena dampak dari pemanasan global. Tidak hanya itu saja, perubahan iklim juga tentu akan berdampak pada perkembangan sosial dan

politik pada suatu negara diantaranya terjadi konflik antar kelompok yang nantinya berkembang menjadi konflik antar negara. Oleh karena itu dalam bab ini akan membahas dampak pemanasan global dan pertemuan-pertemuan internasional sebagai aksi dan reaksi negara-negara di dunia terhadap isu pemanasan global.

Perubahan iklim secara ekstrim dan meningkatnya suhu bumi serta bencana alam yang akan terus mengancam, krisis cadangan air dan energi, merupakan sederet persoalan yang mengglobal dan ancaman akan terjadinya *global chaos*, yang berpotensi menyebabkan adanya perang besar perebutan sumber daya alam untuk saling mempertahankan keberlangsungan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Bank Dunia Ismael Salageldin, bahwa perang abad ini adalah banyak diakibatkan oleh sengketa minyak dan perang masa depan akan dipicu oleh air.

Hal tersebut didukung oleh Vandana Shiva dalam bukunya *Water Wars*, bahwa ada tiga alasan mengapa air menjadi sumber konflik antar bangsa dimasa depan yaitu:²²

- a. Saat ini air telah diubah menjadi *market opportunity* oleh kekuatan neoliberalisme, sehingga air menjadi komoditas bisnis yang harus dipertukarkan dengan uang.
- b. Pasar air dunia diperkirakan melebihi angka 1 trilliun dollar AS.
- c. Terjadi pergeseran control atas air dari komunitas ke negara dan dari negara ke korporasi.

²² Siru, Mardana, *Water Wars: Reintegrasi, Pasokan, Politik, Lingkungan, dan Nilai*, Jakarta: 2009

Dampak terburuknya adalah konflik antar-komunitas yang nantinya akan berujung pada konflik negara. Seperti konflik yang terjadi antara Pakistan dan India yang saling berseteru atas kontrol strategis sungai Indu. Hal yang hampir sama juga terjadi antara China dan India yang berkonflik karena air. Hal ini disebabkan karena, China dianggap telah mengalihkan aliran air dari Himalaya ke China yang seharusnya air tersebut mengalir ke sungai Bramaputera di India.

Hal tersebut merupakan hal sebagian kecil dari fakta masalah lingkungan global yang menghantui masyarakat global. Masalah yang paling penting adalah terancamnya populasi dan keberlangsungan hidup masyarakat negara-negara berkembang (Dunia ketiga) seperti Indonesia, karena bencana alam yang terjadi terus-menerus tanpa bisa di prediksi sebelumnya. Negara-negara berkembang dan negara miskin tentu akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim global pada saat ini diantaranya adalah penyakit yang semakin meningkat, kemiskinan, kelaparan dan bencana alam lainnya.

Tak hanya itu saja yang akan dialami oleh dunia ketiga, karena kebanyakan dari negara -negara berkembang dan negara miskin berada pada daerah tropis. Tentu ini akan menjadi bumerang dan pihak yang paling merugi dan terancam dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang sedang terjadi pada saat ini. Selain itu, tidak hanya negara-negara yang terletak di garis Khatulistiwa yang menderita karena dampak dari kenaikan suhu bumi tetapi juga negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Filipina, Tanzania

Brazil dan lainnya. Negara-negara dataran rendah juga tentu akan mengalami bencana alam seperti banjir besar diantaranya Negara Bangladesh, Laos, Mozambik, Nigeria, Argentina dan lain-lain. Selain negara dataran rendah, negara pulau kecil juga tentu akan mengalami perubahan iklim terutama meningkatnya volume air laut seperti negara yang tergabung dalam OASIS diantaranya Tuvalu, Solomon Islands, Cook Islands, Jamaica, Marshall Islands, Sao Tome and Principe, Barbados, Fiji, Palau, Samoa, Sierra Leone, Senegal dan Togo.

A. Konferensi Diplomatik Menghadapi Perubahan Iklim Sebelum COP 15 di Kopenhagen

A.1 Konferensi PBB Mengenai Lingkungan Hidup Manusia di Stokholm

Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*) yang diadakan di Stokholm swedia dari tanggal 5-16 juni 1972, merupakan konferensi lingkungan hidup yang pertama kalinya diadakan oleh PBB. Deklarasi Stokholm 1972 menjadi sangat dikenal oleh banyak kalangan sebagai salah satu dari hasil konferensi ini. Lahirnya deklarasi ini tidak terlepas dari peran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung diadakannya konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 2849 (XXVI) tanggal 20 Desember 1971.²³ Dengan diadakannya konferensi ini, diharapkan adanya tindakan yang nyata yang harus diambil dalam tingkat nasional maupun internasional

²³ Prasyudanto, Andean, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.

terhadap upaya untuk mengatasi menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup.

Pada tahun 1971 *Panel of Experts on Development and Environment* mengadakan pertemuan di Founex, Swiss. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan sebuah dokumen laporan pertama yang bersifat komprehensif dalam masalah perkembangan isu-isu lingkungan. Maurice Strong yang merupakan Sekretaris Jenderal UNCHE berpendapat bahwa laporan Founex dapat memberikan legitimasi pada pemahaman bahwa lingkungan hidup dan pembangunan saling terkait dan laporan ini juga banyak menghimbau negara-negara berkembang untuk menghadiri konferensi lingkungan hidup yang akan diselenggarakan di Stokholm, Swedia. Pada mulanya persiapan konferensi ini terus dibayangi kegagalan dan mengalami hambatan karena negara-negara berkembang tidak berniat untuk hadir dalam konferensi ini dengan alasan bahwa konsep lingkungan hidup hanya akan menguntungkan negara-negara maju saja padahal negara-negara berkembang membutuhkan dana untuk perbaikan lingkungan hidup dan pembangunan.

Pada 5 Juni 1972, konferensi ini dibuka di Gedung Opera Stokholm yang dipimpin oleh Maurice Strong sebagai Sekretaris Jenderal UNCHE dan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB dan juga yang menandai sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Konferensi dengan tema "*Only One Earth*" ini dihadiri oleh 113 negara dan 400 peninjau dari berbagai kalangan.²⁴ Setelah melalui perdebatan panjang dan melelahkan, konfrontasi utara-selatan saling

kritik Negara maju dan negara berkembang, akhirnya melalui kepiawaian diplomasi Maurice Strong, konferensi ini berakhir pada 16 Juni dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia atau yang lebih dikenal dengan nama “Deklarasi Stockholm 1972 (*Stockholm Declaration*)”. Deklarasi ini terdiri dari pembukaan dan 26 asas.
2. Rencana aksi (*Action Plan*) yang terdiri dari 109 rekomendasi termasuk 18 rekomendasi mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia.
3. Rekomendasi tentang Kelembagaan dan Keuangan untuk menunjang *Action Plan* yang terdiri:
 - (i) Dewan pengurus UNEP (*Governig Council/GC*)
Dewan pengurus ini berisi 58 negara yang dipilih setiap 4 tahun sekali. Dipimpin oleh seorang Presiden.
 - (ii) Sekretariat yang dikepalai Direktur Eksekutif (*Executive Director*)
Dipilih oleh Majelis Umum PBB yang dinominasikan oleh Sekretariat Jenderal PBB dan bermarkas di Nairo, Kenya.
 - (iii) Dana Lingkungan Hidup (*The Environment Fund*)
Membentuk dana lingkungan dengan berdasarkan sistem PBB.
 - (iv) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup (*The Environmental Coordination Board*)
Dibentuk untuk menjamin kerja sama semua badan-badan PBB terutama dalam mandate program-program lingkungan hidup dunia.
4. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*World Environment Day*).²⁵

Setelah dicanangkannya Deklarasi Stockholm 1972, gerakan lingkungan hidup semakin berkembang pesat. Di seluruh dunia gerakan ini memainkan

peranan yang penting dalam mendorong berbagai perundingan internasional

Secara foral konferensi ini memberikan pengakuan penting bagi lingkungan hidup dimana persoalan lingkungan hidup pada mulanya hanya dibicarakan secara terbatas di kalangan akademis dan lembaga ilmiah saja di tingkat nasional, dan kini di transformasikan dalam bidang politik khususnya hubungan internasional. Secara nasional, pengaruh dari konferensi ini juga telah mendorong pengembangan kebijakan lingkungan hidup nasional, khususnya dengan dibentuknya badan-badan lingkungan hidup hingga kementrian lingkungan hidup. Hal yang terpenting adalah diakuinya prinsip kedaulatan negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dengan tanggung jawabnya jika terjadi pencemaran di luar batas wilayah suatu negara.

Dengan dibentuknya UNEP sebagai suatu badan di bidang lingkungan hidup global, maka program-program lingkungan hidup global akan menjadi agenda penting setelah konferensi lingkungan hidup manusia ini. Dalam tingkat internasional UNEP diharapkan berperan sebagai katalisator untuk mendukung kesadaran, kepedulian serta tindakan-tindakan yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

A.2 Konferensi Nairobi

Sepuluh tahun setelah Deklarasi Stokholm 1972 dicanangkan, beberapa persoalan lingkungan hidup global ternyata terus meningkat dan berkembang diantaranya persoalan lapisan ozon, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Masalah klasik seperti pencemaran udara, air dan limbah B3 serta kerusakan lingkungan hidup seperti rusaknya hutan, habitat satwa, masih saja

terjadi bahkan kecenderungan kualitas maupun kuantitas menurun semakin cepat. Visi “Hanya Satu Bumi” (*Only One Earth*) hanyalah gagasan dan angan-angan yang degan cepat meredup dari panggung politik internasional.

Persoalan ini telah menjadi perhatian PBB khususnya *United Nations Enviromental Programme* (UNEP). Dalam rangka mempersiapkan peringatan hari lingkungan hidup ke-10 dan mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan dari Deklarasi Stokholm dan rekomendasinya, maka UNEP memanggil negara-negara anggota PBB dan entitas bukan negara lainnya seperti badan-badan internasional, NGO, akademisi, industriawan dan lain-lain untuk mengadakan pertemuan kembali.

Pertemuan internasional ini diadakan pada 10 Mei sampai dengan 18 Mei 1982 di Markas Besar UNEP di kota Nairobi, Kenya. Selama 8 hari para pihak yang hadir dalam pertemuan ini merundingkan suatu kesepakatan yang tidak mengikat. Akhirnya, hasil dari pertemuan ini melahirkan suatu deklarasi yang dinamai Deklarasi Nairobi (*Nairobi Declaration 1982*). Deklarasi ini merupakan hasil maksimal yang dicapai oleh para delegasi.

Isi dari Deklarasi Nairobi ini terdiri dari 10 bagian yang secara singkat sebagai berikut:²⁶

1. Konferensi Stokholm telah meningkatkan kesadaran dan pengertian mengenai adanya kerusakan lingkungan hidup. Pendidikan, informasi pelatihan telah diperluas, hampir semua negara telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan sudah adanya pengaturan masalah lingkungan secara nasional terutama dalam konstitusi di banyak

- negara. Program-program yang dicanangkan UNEP serta organisasi internasional, pemerintah maupun organisasi non pemerintah (NGO) telah dilaksanakan.
2. Bagaimana pun rencana aksi (*Action Plan*) ternyata hanya diimplementasikan sebagian dan hasilnya sangat tidak memuaskan khususnya bagi kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Untuk alasan ini *action plan* ternyata tidak mampu membawa dampak berarti bagi masyarakat internasional. Beberapa kegiatan manusia tidak terawasi dan terencana menyebabkan kerusakan lingkungan. Penggundulan hutan, penggurunan, terancamnya kondisi hidup manusia, penyakit, perubahan atmosfer, polusi di laut, punahnya spesies masih mengancam.
 3. Pandangan baru telah tumbuh, kebutuhan penilaian dan pengelolaan lingkungan hidup, hubungan dengan lingkungan hidup, pembangunan, pertumbuhan populasi telah diakui. Pendekatan komprehensif dan regional yang terintegrasi telah mendorong pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 4. Ancaman yang masih sangat besar adalah bentuk pemborosan yang mengeksploitasi berlebihan lingkungan hidupnya. Strategi Pembangunan Internasional Ketiga Dekade Pembangunan PBB dan Tata Ekonomi Internasional baru merupakan instrument utama dan upaya global untuk melindungi lingkungan hidup.
 5. Lingkungan hidup manusia yang baik diharapkan akan merupakan keuntungan dalam bentuk perdamaian dan keamanan, bebas dari ancaman perang, khususnya perang nuklir, pemakaian sumber daya alam yang tidak perlu untuk senjata, juga apartheid, rasialisme, segala bentuk diskriminasi, kolonialisme, dan dominasi dapat dihapus.
 6. Masalah lingkungan hidup yang melewati lintas batas nasional dikonsultasikan antar negara dan perlu tindakan internasional. Jadi

negara-negara harus meningkatkan dan mengembangkan hukum lingkungan yang progresif termasuk konvensi kerja serta persetujuan dan kerja sama yang luas dibidang penelitian ilmiah dan pengelolaan lingkungan.

7. Ketidakefisienan lingkungan hidup disebabkan oleh kondisi-kondisi keterbelakangan termasuk faktor eksternal yang diluar kontrol negara -negara, masalah teknik pendistribusian sumber-sumber daya alam diantara negara-negara. Negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang karena pengaruh teknologinya yang membuat masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin serius. Penggunaan teknologi yang cocok di negara berkembang akan membuat kemajuan ekonomi dan sosial dengan perhitungan terhadap konservasi sumber-sumber alamnya.
8. Upaya selanjutnya dikembangkan manajemen berwawasan lingkungan dan metode untuk mengeksploitasi dan penggunaan sumber daya alam dan memodernisasi sistem tradisional. Peran inovasi dalam meningkatkan daur ulang dan konservasi. Penipisan secara tradisional dan konvensional yang cepat terhadap sumber energi menuntut perlunya perubahan secara efektif pengelolaan dan konservasi energi dan lingkungan hidup. Tindakan pengembangan sumber energi yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui akan menguntungkan lingkungan hidup.
9. Pencegahan kerusakan lebih disukai daripada perbaikan kerusakan lingkungan. Pencegahan termasuk perencanaan yang matang semua kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup. Ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan para politisi serta public melalui informasi, pendidikan dan pelatihan. Tanggung jawab individu penting. NGO mempunyai peran penting secara khusus dan memainkan peran inspirasional. Semua industri termasuk perusahaan multinasional harus mengambil tindakan atas tanggung

tahun 1972 yang hanya dihadiri sebagian negara-negara anggota PBB yaitu negara-negara Barat dan sebagian negara-negara berkembang.

KTT ini diselenggarakan dan dimulai pada tanggal 3 Juni hingga 14 Juni 1992 dan dihadiri sekitar 13.000 orang dari berbagai kalangan pemerintah, NGO, Masyarakat, tokoh-tokoh internasional dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan konferensi ini merupakan yang terbesar ketiga yang pernah dilaksanakan. Wakil-wakil dari 178 negara, Masyarakat Eropa, dan 7 anggota komisi regional, organisasi pembebasan seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), 35 *Inter Governmental Organization* (IGO), 1500 NGO/ Lembaga Swadaya Masyarakat serta 7000 delegasi lainnya dan kurang lebih ada 60 pertemuan yang berbeda, berkumpul untuk membahas prospek masa depan planet ini. Dalam pelaksanaannya KTT Bumi ini diselenggarakan di 3 tempat yakni di *Baixada Fluminense*, Taman Flamengo (*Flamengo Park*) dan *Rio Centro*. Di *Baixada Fluminense* merupakan tempat bertemunya para tokoh keagamaan. Sedangkan *Flamengo Park* merupakan tempat bertemunya berbagai organisasi seperti LSM, para pakar dan individu yang disebut sebagai *Global Forum*. Berbeda dengan *Rio Centro* karena tempat ini menjadi pusat perhatian dimana tempat ini menjadi pertemuan para delegasi Negara-negara.

Pada tanggal 3 Juni sekitar pukul 11.00 waktu Rio, konferensi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali di Rio Centro tempat delegasi resmi pemerintahan hadir. Dalam pidatonya Sekretaris Jenderal PBB mengusulkan konsep pembangunan berskala global.

Dalam pertemuan *Global Forum* yang dilaksanakan di *Flamengo Park*

jawab lingkungan berkenaan dengan produksi atau teknologi ekspor ke negara lain. Tindakan legislatif perlu dihormati.

10. Masyarakat dunia menegaskan kembali komitmen Deklarasi Stokholm dan *Action Plan* serta juga memperkuat dan memperluas upaya kerja sama nasional dan internasional di bidang perlindungan lingkungan hidup. Hal ini juga menegaskan kembali dukungan terhadap UNEP sebagai alat katalisator kerja sama global dan peningkatan sumber-sumber khususnya dana lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dunia melaksanakan tanggung jawab sejarah, secara kolektif maupun individual, terhadap planet bumi untuk generasi mendatang dengan jaminan kondisi kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia secara menyeluruh.

Dari hasil konferensi Nairobi ini dapat disimpulkan bahwa Deklarasi Stokholm 1972 dan *Action Plan* masih belum memuaskan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya yang harus dihadapi oleh negara-negara dalam memecahkan masalah lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang cepat serta timpangnya pembangunan yang diterapkan di banyak negara semakin membutuhkan upaya-upaya lebih lanjut.

A.3 KTT Bumi

Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (*United Nation Conference on the Environment and Development/ UNCED*) atau disebut KTT Rio (*Rio Summit*) atau juga dikenal dengan sebutan KTT Bumi merupakan KTT yang diselenggarakan setelah perang dingin berakhir. Dalam pertemuannya KTT ini dihadiri oleh semua negara anggota PBB. Hal ini tentu

tampaknya lebih hangat dengan berbagai lobi, pidato tanpa akhir, pertemuan teknis, sidang-sidang strategi, perancangan dokumen, konfrontasi utara-selatan, serta kompromi dan kesepakatan. Hasil-hasil yang dicapai lebih realistis dengan dokumen berupa Perjanjian Alternative dan Piagam Bumi.

Setelah melalui pertemuan dan perdebatan panjang, ternyata banyak persoalan yang belum terselesaikan seperti masalah stok ikan yang berpindah, rancangan konvensi pengurusan. Namun pada akhirnya *Earth Summit* berhasil memutuskan beberapa dokumen penting yaitu:²⁷

- a. Deklarasi Rio 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan (*Rio Declaration on Environmental and Development*).
- b. Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Convention Framework on Climate Change*).
- c. Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*).
- d. Prinsip-prinsip Kehutanan (*Non-Legally Binding Authoritative Statments of Principls for a Global Consensus on the Management, Conservation and Suistanable Development of all Types Of Forest*).
- e. Agenda 21.

Namun usulan dalam *Global Forum* untuk memasukkan Piagam Bumi dan perjanjian alternative tidak diterima dalam pertemuan para delegasi resmi pemerintahan di *Rio Centro*. Dengan demikian hasil *Global Forum* walaupun tidak mengikat secara hukum namun tetap menjadi acuan penting bagi keputusan akhir yang dihasilkan dari delegasi resmi pemerintahan

Setelah berakhirnya KTT Bumi, tampaknya telah tercipta dasar-dasar hubungan internasional baru dan perubahan sistem lama tentang keamanan kolektive yang terbentuk atas dasar ideologi, konfrontasi bersenjata dan kekhawatiran akan sama-sama hancur, telah bergeser dan berubah menjadi ancaman keamanan akibat ketidakadilan ekonomi dan kerusakan ideologi. Namun hal yang terpenting adalah KTT ini telah memberikan ide, pandangan, gagasan, harapan dan aspirasi. Namun, setelah KTT ini diharapkan adanya tindakan-tindakan lanjutan yang dilaksanakan baik di tingkat internasional, regional maupun nasional hingga lokal.

A.4 KTT New York (Rio+5)

Dalam rangka menindaklanjuti dan melihat hasil-hasil yang telah dicapai selama berakhirnya KTT Bumi, maka pada tahun 1997 di kota New York, AS diadakan suatu pertemuan yang disebut sebagai Konferensi Rio+5 atau disebut juga dengan KTT Bumi +5. Dalam konferensi ini dilaporkan hasil-hasil KTT Bumi 1992 yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Delegasi Indonesia juga melaporkan pelaksanaan agenda 21 di Indonesia, walaupun Dewan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia gagal di bentuk.

Dewan Ekonomi sosial PBB (UN-ECOSOC) melalui Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development* CSD) telah menyiapkan sebuah dokumen yang berjudul “program implementasi berkelanjutan Agenda 21”. Dalam sidang ini dibahas mengenai program kerja komisi dari tahun 1998-2002. Rio+5 dihadiri 50 menteri dan lebih dari 1000

organisasi non pemerintah. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan membantu komisi untuk bekerja lebih banyak dengan pemerintah nasional dan rekanan NGO lainnya untuk memperkenalkan pembangunan berkelanjutan keseluruhan dunia.

Dalam Konferensi Rio+5 secara bersamaan juga diadakan Sidang Majelis Umum ke-55 yang kemudian memutuskan bahwa pada bulan desember 2000 CSD berperan sebagai badan pusat pengelolaan untuk penyelenggaraan konferensi Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang akan diselenggarakan tahun 2002.

A.5 KTT Johannesburg

Kegiatan diplomasi lingkungan yang menduduki status yang sangat penting di milenium yang baru ini adalah KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development/WSSD*), atau yang sering disebut sebagai KTT Rio+10 atau yang dikenal dengan sebutan KTT Johannesburg yang diadakan tahun 2002. Berbeda dengan KTT Bumi 1992 yang menekankan permasalahan lingkungan hidup, WSSD justru lebih memperluas lingkungan hidup dengan aspek-aspek pembangunan lainnya yaitu melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Karena itu dalam WSSD ini tidak hanya dihadiri oleh menteri lingkungan saja, akan tetapi juga menteri-menteri bidang lainnya seperti Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Energi, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian yang terkait dengan isu-isu *Water, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity* (WEHAB). Hal yang terpenting ini adalah diadakannya KTT ini bertujuan untuk mengevaluasi kegagalan dan

keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terutama seperti yang tercantum dalam agenda 21 yang merupakan hasil dari KTT Rio 1992.

Dalam rangka mempersiapkan berlangsungnya KTT dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan, diadakan terlebih dahulu beberapa pertemuan tingkat subregional, regional, intraregional, *special meetings* maupun *PrepCom*. Adapun pertemuan tingkat regional yang telah dilakukan sebagai persiapan KTT sebagai berikut.²⁸

1. Pertemuan Tingkat Menteri Regional untuk KTT Pembangunan Berkelanjutan (*Regional Ministerial Meeting for the WSSD*) yang diadakan oleh Komisi Ekonomi Eropa (*Economic Commission for Europe*) yang diadakan pada tanggal 24-25 September 2001.
2. Konferensi Persiapan Afrika untuk WSSD (*African Preparatory Conference for WSSD*) yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2001 di Nairobi Kenya.
3. Konferensi Persiapan Regional Amerika Latin dan Kepulauan Karibia untuk WSSD (*Regional Preparatory Conference of Latin America and the Carribean for WSSD*) yang diadakan pada 23-24 Oktober 2001 di Rio De Janeiro, Brasil.
4. Pertemuan Tingkat Menteri Kawasan Persatuan Arab untuk Tanggung Jawab Pembangunan, Perencanaan dan Lingkungan (*Meeting of the Arab Ministers Responsible for Development, Planning and Environment*) yang diadakan pada tanggal 24 Oktober 2001 di Kairo, Mesir.
5. Pertemuan Tingkat Tinggi Regional Asia Afrika untuk WSSD (*Asia Pacific High Level Regional Meeting for the WSSD*) yang diadakan pada tanggal 27-28 November di Buon Park, Vietnam.

Sedangkan pertemuan Panitia Persiapan (*Preparatory Committed PrepCom*) diadakan 4 kali yaitu:²⁹

1. *PrepCom I*

Diadakan pada tanggal 30 April 2001 yang sekaligus merupakan pertemuan *Commission on Sustainable Development* (CSD) ke-10 di Markas PBB New York. Dalam pertemuan ini terpilih Prof. Dr. Emil Salim sebagai *Chief of the Bureau PrepCom*.

2. *PrepCom II*

Diadakan pada tanggal 28 Januari – 8 Februari 2002 di Markas PBB, New York.

3. *PrepCom III*

Diadakan pada tanggal 25 Maret – 2 April 2002 di Markas PBB, New York.

4. *PrepCom IV*

Diadakan pada tanggal 27 Mei – 7 Juni Kota Denpasar, Bali, Indonesia.

Selain pertemuan-pertemuan regional tersebut, juga diadakan pertemuan intraregional yang berhasil menyepakati beberapa hal untuk dibahas dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan diantaranya adalah:³⁰

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Implementasi dari Prinsip Rio
- c. Masalah Keuangan dan beban utang
- d. Globalisasi
- e. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- f. Manajemen sumber daya alam
- g. Pertanian dan persediaan pangan
- h. Energi
- i. Air bersih dan sanitasi

²⁹ *Ibid*, Hal 137

³⁰ *Ibid*, Hal 138

- j. Pemukiman penduduk berkelanjutan
- k. Kesehatan
- l. Pengembangan sumber daya manusia
- m. Pendanaan dan pembangunan berkelanjutan
- n. Akses perdagangan dan pasar
- o. Alih teknologi dan pembangunan kapasitas
- p. Sumber daya pemerintah/ struktur kelembagaan serta pembangunan berkelanjutan
- q. Pembuatan keputusan dan kebutuhan informasi.

KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan ini diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus hingga 4 September 2002. KTT ini diselenggarakan di *Sandton Convention Center* di Johannesburg Afrika Selatan. KTT ini dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Mandela dan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan. Selain itu, KTT ini dihadiri oleh lebih dari 100 kepala negara atau pemerintahan. Hadir juga badan-badan PBB, NGO yang tergabung dalam *Civil Society Organization-CSO*, kelompok-kelompok utama dan individu-individu dari berbagai negara. Lebih dari 5000 delegasi menghadiri KTT ini.

Akhirnya, KTT di Johannesburg berhasil mengambil keputusan untuk menyetujui dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan sejak *PrepCom I* di antaranya:³¹

1. Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan (*Johannesburg Declaration on Sustainable Development*). Deklarasi ini memuat 6 hal yang harus dilakukan dan 37 prinsip yang dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
2. Rencana Pelaksanaan Johannesburg (*Johannesburg Plan of Implementation*).

Rencana pelaksanaan ini terdiri dari 11 bab yaitu:

- Bab 1 : Pendahuluan
- Bab 2 : Penghapusan Kemiskinan
- Bab 3 : Mengubah Pola Konsumsi dan Produksi yang tidak Berkelanjutan.
- Bab 4 : Melindungi dan Mengelola Basis Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi dan Sosial.
- Bab 5 : Pembangunan Berkelanjutan dalam Era Globalisasi.
- Bab 6 : Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan
- Bab 7 : Pembangunan Berkelanjutan negara-negara Berkembang Kepulauan Kecil!
- Bab 8 : Pembangunan Berkelanjutan untuk Afrika.
- Bab 9 : Prakarsa-prakarsa Regional lainnya.
- Bab 10 : Sarana Pelaksanaan.
- Bab 11 : Kerangka Kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Dari hasil KTT di atas perlu digarisbawahi bahwa negara-negara didunia telah sepakat untuk melaksanakan hasil-hasil yang dicapai dan menindaklanjuti hasil-hasil tersebut ditingkat nasional. Dengan demikian diharapkan komitmen disemua negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dicapai. Terutama bagi Indonesia hal ini sangat penting dikarenakan kondisi lingkungan hidup Indonesia juga akan dipengaruhi kondisi lingkungan global. Selama sidang yang dilakukan di Markas PBB, New York, diplomasi lingkungan yang dilakukan delegasi Indonesia cukup berpengaruh terutama dalam melakukan lobi-lobi dan penguasaan proses perundingan karena keikutsertaan langsung para diplomat dari Perwakilan Tetap RI di PBB.

Puncak keberhasilan diplomasi lingkungan Indonesia adalah ditunjuknya Prof

Dr. Emil Salim sebagai Ketua *PrepCom* dan Indonesia menjadi tuan rumah pada *PrepCom IV*.³²

Hasil konferensi-konferensi lingkungan hidup diatas, telah mencerminkan kemauan dan komitmen negara-negara di dunia untuk memperbaiki kualitas kehidupan planet bumi. Diplomasi lingkungan menjadi salah satu harapan dalam mencapai kesepakatan dan tindakan bersama serta upaya-upaya lebih lanjut melalui berbagai kegiatan di tingkat Internasional maupun nasional. Secara ringkas dapat dilihat dalam table dibawah ini hasil-hasil kesepakatan dalam konferensi-konferensi diplomatik yang terpenting khususnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dibidang Lingkungan Hidup secara ringkas:³³

Tabel 2.1

Konferensi Tingkat Tinggi dan Hasil yang Dicapai

Tahun 1972	Tahun 1982	Tahun 1992	Tahun 2002
UNCHE, Stockholm, Swedia	UNCHE Plus 10, Nairobi, Kenya	UNCED, Rio De Janeiro, Brasil	WSSD, (Rio Plus 10) Johannesburg, Afrika Selatan
Partisipan: Anggota PBB kecuali Uni Soviet dan Negara satelitnya dan Badan-Badan Internasional	Partisipan: Seluruh Anggota PBB dan Badan-Badan Internasional	Partisipan: Seluruh Anggota PBB maupun non PBB, Badan-Badan Internasional, Kelompok-Kelompok Utama Agenda 21	Partisipan: Anggota PBB, Badan-Badan Internasional PBB maupun non PBB, Kelompok-kelompok utama Agenda 21

³² Bramudianto, Andraso, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.

<p>Hasil Keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Stockholm - 109 Rencana Aksi dan Rekomendasi 	<p>Hasil Keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Nairobi 	<p>Hasil Keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Rio - Agenda 21 - Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati - Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim - Prinsip-Prinsip Kehutanan 	<p>Hasil Keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Johannesburg - Implementasi Johannesburg
---	---	---	---

B. Perjalanan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

B.1 Pelaksanaan Conference of Parties (COP)

Conference of Parties (COP/Konferensi Para Pihak) adalah otoritas tertinggi dalam kerangka PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*). Merupakan asosiasi para pihak dalam meratifikasi konvensi yang bertanggung jawab menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan utama konvensi. Secara rutin COP akan meninjau komitmen para pihak. Terutama yang berhubungan dengan strategi komunikasi nasional dan pengalamannya menerapkan kebijakan nasional yang terkait dengan isu perubahan iklim.

Termasuk menegosiasikan keterikatan negara-negara berkembang dalam

mereduksi emisi gas rumah kaca, sebagaimana yang tercantum dalam Protokol Kyoto.

Konferensi Para Pihak ini diselenggarakan satu tahun sekali atau pada saat dibutuhkan dalam kondisi tertentu, ketika para pihak menghendaki. Hal ini dilakukan guna meninjau dan memantau sejauh mana pelaksanaan dari COP itu sendiri. Penentuan tempat penyelenggaraan COP didasarkan atas tawaran yang disampaikan negara calon tuan rumah UNFCCC. Jika tidak ada penawaran, maka secara otomatis COP akan diselenggarakan di Sekretariat UNFCCC di Bonn, Jerman. Demikian halnya dengan pemilihan Presiden COP, diusulkan oleh negara tuan rumah dan mendapat persetujuan secara aklamasi oleh peserta COP.

Berikut ini adalah penyelenggaraan beberapa COP yang diselenggarakan dari tahun ke tahun:³⁴

a. CoP Ke-1

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Berlin, Jerman, 1995.
- Presiden COP terpilih: Dr. Angela Merkel, Menteri Lingkungan, Perlindungan Alam, dan Keamanan Nuklir Jerman.
- Hasil: Mandat Berlin (*Berlin Mandate*). Antara lain berisi persetujuan para pihak untuk memulai proses yang memungkinkan untuk mengambil tindakan pada masa setelah tahun 2000, termasuk menguatkan komitmen negara-negara maju melalui adopsi suatu protokol atau instrument legal lainnya.

b. CoP Ke-2

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Jenewa, Swiss, Juli 1996.
- Presiden COP terpilih: Chen Chimutengwende, Zimbabwe.

³⁴ Majalah Gatra Edisi Khusus Perubahan Iklim Global, Rabu 28 November 2007, Hal 127.

- Hasil: Deklarasi Jenewa (*Geneva Declaration*). Berisi 10 butir deklarasi. Antara lain berisi ajakan kepada semua pihak untuk mendukung pengembangan protokol dan instrument legal lainnya yang didasarkan atas temuan ilmiah.

Deklarasi ini juga mengintruksikan kepada semua perwakilan para pihak untuk mempercepat negosiasi terhadap teks protokol, yang secara hukum akan mengikat sehingga bisa diadopsi pada COP ke-3.

c. *CoP Ke-3*

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Kyoto, Jepang, Desember 1997.
- Presiden COP terpilih: Hiroshi Oki, Ketua Badan Lingkungan Jepang.
- Hasil: Adopsi Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*). Diterbitkan di Kyoto, 11 Desember 1997. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah. Ditegaskan bahwa negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%).

Tujuan dari protokol ini adalah mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca yakni karbon dioksida, metana, *nitros oxide*, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008 dan 2012.

d. *CoP Ke-4*

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Buenos Aires, Argentina, November 1998.
- Presiden COP terpilih: Maria Julia Alsogaray, Menteri Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan Argentina.
- Hasil: Rancangan Aksi Buenos Aires (*Buenos Aires Plan of Action/BAPA*). Merupakan COP pertama yang langsung di

negara berkembang. Bertujuan merancang tindak lanjut implementasi Protokol Kyoto berikut tenggat waktunya, terutama yang berhubungan dengan alih teknologi dan mekanisme keuangan, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Namun pada kenyataannya, COP ke-4 ini tidak berhasil menjadwalkan implementasi Protokol Kyoto secara pasti. Namun dinilai cukup berhasil meletakkan landasan bagi COP-COP berikutnya. Antara lain melalui 19 keputusan menyangkut masalah teknis pengurangan emisi, keuangan, kelembagaan dan pelaporan.

e. CoP Ke-5

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Bonn, Jerman, Oktober-November 1999.
- Presiden COP terpilih: Jan Szyzko, Menteri Perlindungan Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Hutan Polandia.
- Hasil: Periode Implementasi BAPA (COP Ke-4) yang berisi pertemuan-pertemuan teknis yang relatif tidak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan besar. Dalam BAPA para pihak mengalokasikan tenggat waktu dua tahun (COP Ke-5 dan COP Ke-6) untuk memperkuat komitmen terhadap konvensi dan penyusunan rencana serta pelaksanaan Protokol Kyoto.

f. CoP Ke-6

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Den Haag, Belanda, November 2000.
- Presiden COP terpilih: Jan Pronk, Menteri Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Belanda.
- Hasil: Disebut-sebut sebagai malapetaka negosiasi dalam sejarah penyelenggaraan COP. Tidak satupun implementasi BAPA yang berkaitan dengan pengoperasian Protokol Kyoto, yang merupakan agenda utama COP 6 ini dapat disepakati.

Alhasil, diputuskan bahwa penyelesaian COP Ke-6 ditunda (*suspended*) dan akan dilanjutkan kembali (*resumed*) pada COP Ke-6 bagian II yang diselenggarakan di Bonn, Jerman.

g. *CoP Ke-6 Bagian II*

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Bonn, Jerman, Juli 2001.
- Presiden COP terpilih: Jan Pronk, Menteri Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Belanda.
- Hasil: Kesepakatan Bonn (*Bonn Agreement*) dalam rangka implementasi BAPA. Berisi antara lain, mekanisme pendanaan dibawah protocol dengan referensi beberapa pasal Protokol Kyoto, membentuk dana baru diluar ketentuan konvensi bagi Negara berkembang, dan membentuk dana adaptasi dari *Clean Development Mechanism* (CDM).

Sementara itu, untuk dampak negatif perubahan iklim, pendanaannya akan ditangani *melalui Global Environment Facility* (GEF). Ada juga poin tentang pembangunan dan alih teknologi dengan membentuk kelompok ahli teknologi yang beranggotakan 20 orang dengan distribusi geografis merata.

h. *CoP Ke-7*

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Marrakesh, Maroko, Oktober-November 2001.
- Presiden COP terpilih: Mohamed Elyazghi, Menteri Perencanaan Wilayah, Pedesaan, Perumahan, dan Lingkungan Maroko.
- Hasil: Persetujuan Marrakesh. Tujuan utama COP Ke-7 adalah menyelesaikan persetujuan mengenai rencana terinci tentang cara-cara penurunan emisi menurut Protokol Kyoto dan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang memperkuat implementasi Konvensi Perubahan Iklim.

Tonggak penting COP kali ini adalah disepakatinya implementasi BAPA yang sudah dibicarakan dalam tiga tahun

terakhir, sehingga melancarkan jalan bagi efektifnya operasional Protokol Kyoto. Selain itu, delapan konsep keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan pendanaan sebagaimana telah disepakati dalam COP Ke-6 bagian II di Bonn segera diajukan dan diadopsi sebagai keputusan.

i. CoP Ke-8

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: New Delhi, India, Oktober-Noveber 2002.
- Presiden COP terpilih: T.R. Baalu, Menteri Lingkungan dan Kehutanan India.
- Hasil: Deklarasi New Delhi (*New Delhi Declaration*). Deklarasi ini terdiri dari 13 butir sebagai upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim sembari mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Butir-butir itu antara lain, menyebutkan: Protokol Kyoto perlu segera diratifikasi oleh pihak yang belum melakukannya. Butir lain menyebutkan, upaya antisipasi perubahan harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional. Butir berikutnya menegaskan bahwa upaya menangani masalah-masalah air, energi, kesehatan, pertanian dan keanekaragaman hayati melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan perlu memanfaatkan *Johannesburgh Plan of Implementation*.

Butir terakhir deklarasi ini menyebutkan, negara-negara industri yang tergabung dalam ANNEX I diingatkan untuk mengimplementasikan komitmennya terhadap UNFCCC. Sedangkan negara-negara ANNEX II diminta mewujudkan dukungan mereka terhadap upaya alih teknologi dan

j. *CoP Ke-9*

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Milan , Italia, Desember 2003.
- Presiden COP terpilih: Miklos Persanyi, Menteri Lingkungan dan Air Hongaria.
- Hasil: Ada beberapa isu yang dibahas dalam COP Ke-9. Antara lain aturan mengenai mekanisme pembangunan bersih di sektor kehutanan. Hasilnya berupa kesepakatan untuk mengadopsi keputusan kegiatan aforestasi dan reforestasi di bawah skema *Clean Development Mechanism*.

k. *CoP Ke-10*

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Buenos Aires, Argentina, Desember 2004.
- Presiden COP terpilih: Gines Gonzales Garcia, Menteri Kesehatan dan Lingkungan Argentina.
- Hasil: Membahas adaptasi perubahan iklim dan menghasilkan *Buenos Aires Programme of Work on Adaption and Response Measure*. Delegasi dari negara berkembang menyatakan bentuk COP Ke-10 sebagai adaptasi COP. Dengan demikian, tujuan COP kali ini adalah mendorong negara maju untuk mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk negara berkembang yang telah merasakan dampak buruk perubahan iklim.

l. *CoP Ke-11 (COP/MOP ke-1)*

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Montreal, Kanada, Desember 2005.
- Presiden COP terpilih: Stephane Dion, Menteri Lingkungan Kanada.
- Hasil: Rancangan Aksi Montreal (*Montreal Action Plan*). Berdasarkan artikel 13 Protokol Kyoto, para pihak yang telah meratifikasi protokol akan bertemu dalam *Conference of Parties*

Serving as Meeting of Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP), yang dilaksanakan berbarengan dengan COP.

Para pihak yang tidak meratifikasi protokol dapat hadir sebagai *observer* dalam COP/MOP, tapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Dalam COP/MOP ke-1 tahun 2005 dihasilkan salah satu keputusan penting: para pihak memutuskan untuk mempertimbangkan komitmen lanjutan ANNEX I untuk periode setelah 2012.

Hal ini mendorong pembentukan *Ad-Hoc Working Group of Parties to the Protocol Kyoto (AWG)* untuk menindaklanjutinya dan akan dilaporkan kepada COP/MOP. COP/MOP Ke-1 dilangsungkan bersamaan dengan COP Ke-11 di Montreal pada 2005.

Isu-isu lain yang dibicarakan dalam COP Ke-11 ini adalah menyelesaikan rincian tentang bagaimana melaksanakan Protokol Kyoto. Menggalang kesepakatan diantara penanda tangan Protokol Kyoto tentang rencana memperbesar pemotongan emisi gas rumah kaca setelah tahun 2012.

m. CoP Ke-12 (COP/MOP ke-2)

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Nairobi, Kenya, November 2006.
- Presiden COP terpilih: Kivutha Kibwana, Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kenya.
- Hasil: Tema perdebatan hangat berkaitan dengan implementasi Protokol Kyoto dalam COP/MOP Ke-2, yang diselenggarakan berbarengan dengan COP Ke-12, ini adalah seputar pelaksanaan Komitmen Periode II setelah tahun 2012 (*post-2012*). Masalah penting yang menjadi perhatian pada komitmen adalah: berapa lama jangka waktu pelaksanaan komitmen II? Berapa besar target emisi yang akan dicapai? Sektor apa yang akan menjadi perhatian utama? Apakah *Clean Development Mechanism*

(CDM) masih dilaksanakan dengan skema yang sama atau ada perubahan? Apakah dimungkinkan pelaksanaan skema lain dalam Protokol Kyoto selain CDM?

COP Ke-12 juga menetapkan *five year programme of work on impacts, vulnerability and adaption to climate change*. Ditujukan untuk membantu semua pihak untuk meningkatkan pengertian dan pengkajian, dampak kerentanan dan adaptasi serta untuk membuat agar keputusan mengenai aksi dan tindakan adaptasi yang praktis mendapatkan informasi yang memadai guna menanggapi perubahan iklim.

n. CoP Ke-13 (COP/MOP ke-3)

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Nusa Dua, Bali, Indonesia Desember 2007.
- Presiden COP terpilih: Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup
- Hasil: Kesepakatan mengenai batas waktu dan negosiasi terstruktur pada kerangka pasca-2012 (akhir periode komitmen pertama Protokol Kyoto) tercapai dengan penerapan Rencana Aksi Bali (*Bali Action Plan/Keputusan 1/CP.13*). Negosiasi ini berlangsung selama tahun 2008 (yang mengarah ke COP 14/MOP 4 di Poznan, Polandia) dan 2009 (yang mengarah ke COP 15/MOP 5 di Kopenhagen).

o. CoP Ke-14 (COP/MOP ke-4)

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Poznan, Polandia. Desember 2008.
- Presiden COP terpilih: Maciej Nowicki
- Hasil: Perundingan perubahan iklim di Poznan merupakan bagian dari rangkaian perundingan yang dimulai di COP-13 di Bali tahun 2007 lalu untuk mencapai kesepakatan baru tentang perubahan iklim pasca 2012 yang diharapkan dapat disepakati

pada COP-15 yang akan diselenggarakan pada Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.

Hasil COP-14 Poznan sesungguhnya belum mencerminkan kemajuan yang berarti dalam mencapai stabilisasi emisi GRK di atmosfer. Berdasarkan laporan IPCC AR-4, kesempatan untuk mencegah kenaikan emisi GRK mencapai 450 ppm yang dapat menghasilkan kenaikan rata-rata suhu bumi sebesar 2 derajat Celcius berkisar antara 10-15 tahun, tergantung pada kecepatan pertumbuhan emisi GRK saat ini. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya bencana lingkungan yang masif, emisi GRK harus dikurangi secara signifikan sebelum 2020 dan stabilisasi serta penurunan emisi di atmosfer sebelum 2050.

p. CoP Ke-15 (COP/MOP ke-5)

- Tempat dan waktu penyelenggaraan: Kopenhagen, Denmark, Desember 2009
- Presiden COP terpilih: Lars Rasmussen,
- Hasil: Selain keputusan-keputusan terkait agenda COP 15 dan CMP 5, Pertemuan Para Pihak (COP) ke-15 UNFCCC di Kopenhagen mencatat (*take notes*) adanya dokumen "*Copenhagen Accord*". *Copenhagen Accord* merupakan pernyataan politik berisi 12 butir kesepakatan dan tidak mengikat secara hukum. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah perundingan alot di menit-menit terakhir antara Amerika Serikat dengan China, India, Brazil dan Afrika Selatan.

C. Negara-negara Anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

Negara-negara anggota yang meratifikasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) terbagi menjadi tiga kelompok:

- a. Negara-negara Annex I (Negara-negara industri). Negara-negara Annex I merupakan negara-negara yang telah menyumbangkan efek GRK akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri pada tahun 1850-an. Ada 40 negara Annex I yang diklasifikasikan sebagai negara industri yaitu: Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, Rusia, Selandia Baru, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swis, Turki, Ukraina, Yunani.
- b. Negara-negara Annex II yaitu negara-negara maju yang diwajibkan yang menyediakan sumber daya keuangan guna membayar biaya adaptasi yang dikeluarkan negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim.³⁵ Ada 23 negara yang diklasifikasikan sebagai negara maju yang harus membayar biaya dari negara-negara berkembang: Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang,

Jerman, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Perancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Swiss, Yunani.

- c. Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I, yang kontribusinya terhadap GRK jauh lebih sedikit serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah dan Indonesia termasuk dalam salah satunya.

Negara-negara Annex I setuju untuk mengurangi emisi mereka (khususnya karbondioksida) sesuai yang telah ditentukan pada tahun 1990. Jika mereka tidak mampu melakukannya, maka mereka harus membayar beban emisi untuk usaha konservasi atau perbaikan. Negara-negara Annex II, yang menyediakan sumber daya keuangan bagi negara-negara berkembang.

D. Tujuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

Tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim ini adalah seperti yang tercantum dalam pasal 2 Protokol Kyoto yaitu untuk : *Menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer pada tingkat tertentu dari kegiatan manusia yang membahayakan system iklim.*³⁶ Dalam pasal tersebut dijelaskan tingkat konsentrasi yang hendak distabilkan dan tidak ditentukan, maka dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda sambil menggunakan kemungkinan dilakukan adaptasi dan mitigasi perubahan

Untuk mencapai tujuan Kovenensi diperlukan prinsip-prinsip dasar dasar antara lain:

1. Kesetaraan (*Equity*)

Iklim global dan sistem iklim dimiliki secara adil oleh semua umat manusia, termasuk generasi mendatang.

2. Tanggung Jawab Bersama Tapi Berbeda (*Common But Differentiated Responsibilities*).

Semua negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini sesuai dengan dalam pasal 3 yang berbunyi: *Setiap Pihak memiliki tanggung jawab umum yang sama, namun secara khusus harus dibedakan sesuai dengan kemampuannya (Common But Differentiated Responsibilities).*³⁷

3. Tindakan Kehati-hatian (*Precautionary Measure*)

Apabila ada ancaman kerusakan yang serius dan ketidakpastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Karena dunia tidak bisa menunggu hasil kajian ilmiah yang mutlak tanpa melakukan sesuatu untuk mencegah dampak pemanasan global lebih lanjut.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Meski secara mendasar prinsip pembangunan berkelanjutan ini masih dalam perdebatan, namun dapat digambarkan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua negara mempunyai hak dan kewajiban untuk